



**Laporan Kinerja Triwulan 4
Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat selama triwulan 4 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 4	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan				
[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran	1.31	Persen	1.31	1.59
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik	Sangat Baik	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A	A	Predikat	A	AA

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan
[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran

Progress/Kegiatan

RO DCI.003

1. Pelatihan Daring Calakan;
2. Pojok Belajar dan Pojok Komunitas;
3. Sosialisasi dan seminar Pendidikan calon Guru;
4. Refleksi - Pelatihan Fasilitator Daerah BK Hebat Prov. Jawa Barat - Dikdas;
5. Pelatihan Pembelajaran Mendalam bagi Guru Dikmen Kerjasama dengan Persis.

RO QDC.011

1. Pelatihan Koding KA bagi Guru Kerjasama dengan Persis;
2. Jambore CERIA Guru/Pendidik PAUD dan PNF Provinsi Jawa Barat;
3. Rapat Koordinasi Disdik untuk Program Prioritas Tahun 2026;
4. Guru Sahabat Keluarga: Pelatihan Kepemimpinan Keluarga dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2025.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

RO SCI.010

1. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah;
2. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium;
3. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan;
4. Pendampingan Pengelolaan Kinerja dan Pemanfaatan Bahan Ajar Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) dalam rangka Sosialisasi Rumah Pendidikan;
5. Peningkatan Kapasitas SDM UPT (BBGTK/BGTK/KGTK) dalam mengawal program prioritas kemendikdasmen sekretariat GTK;
6. Peningkatan kompetensi dan ketrampilan bagi DWP sebagai mitra pendamping di lingkungan Ditjen GTKPG;
7. Seminar Internasional GTK;

RO SCI.011

1. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris Jenjang SMP-SMA;
2. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SD Materi Bahasa Inggris;
3. Pelatihan Matematika Gembira;
4. Pelatihan Kesehatan reproduksi;
5. Pembekalan Juri dan Penilaian Lomba Apresiasi GTK;
6. Penilaian Praktik baik Lomba Apresiasi GTK;
7. Pemberian Penghargaan HGN;
8. Karetasobat Bandung Raya;
9. Program Nawala;
10. Seminar International GTK Seminar Internasional Implementasi GCED pada Pembelajaran Mendalam untuk Mengokohkan Dimensi Profil Lulusan;
11. Seminar Hari Guru Nasional;

Kendala/Permasalahan

1. Penjaringan GTK sebagai peserta untuk pelatihan Daring Calakan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota belum menggambarkan kebutuhan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan peserta, sehingga materi diklat yang disajikan kurang diminati oleh peserta;
2. Pelaksanaan Pojok Belajar dan Komunitas Belajar sesuai ajuan GTK mengalami kekurangan pengajar karena penugasan program prioritas, sehingga materi ajar yang disampaikan kepada peserta kurang optimal;
3. Koordinasi antara Fasda BK, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan di daerah belum berjalan optimal, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan tindak lanjut;
4. Kurang antusiasmenya tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dan data tidak update sehingga banyak mismatch antara tenaga kependidikan yang diundang dengan kebutuhan pelatihan;
5. Kendala sistem KSPSTK yang masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian ke arah yang lebih baik, berpengaruh kepada kelancaran pelaksanaan pelatihan BCKS, (tidak munculnya data dalam system);
6. Materi kesehatan reproduksi masih dianggap sensitif oleh sebagian peserta maupun lingkungan, sehingga dapat memengaruhi keterbukaan dalam diskusi dan proses pembelajaran;
7. Linimasa penyelesaian program prioritas berada di triwulan ke IV (Program BK, PKG Bahasa Inggris, Program Tendik, Program Pembelajaran Mendalam, Program KKA, Program Matematika Gembira, Kegiatan HGN dan program inovasi lainnya) sehingga diperlukan strategi dalam mengatur jadwal maupun sumber daya manusia yang akan ditugaskan atau menangani kegiatan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Pelaksanaan Daring Calakan pada tahun berikutnya dapat dilakukan dengan membuat peta kompetensi dan kebutuhan peningkatan kompetensi GTK sehingga materi diklat yang disajikan benar-bear sesuai dengan yang dibutuhkan oleh GTK peserta;



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Strategi pelaksanaan Pojok Belajar dan Komunitas Belajar perlu diperbaharui dengan menjadwalkan layanan secara rutin berkala dan materi ajar yang sudah dirancang dalam layanan tersebut;
3. Pembagian peran yang jelas antara Fasda BK, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan, serta melakukan advokasi dan pendampingan dalam melaksanakan tindak lanjut;
4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk menghadirkan tendik yang memenuhi syarat sesuai dengan kondisi di lapangan untuk menjadi peserta pelatihan peningkatan kompetensi. Strategi selanjutnya, bersama dengan Dinas Pendidikan melakukan pemetaan ulang data tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
5. Berkoordinasi dengan direktorat KSPSTK terkait pelaksanaan seleksi substansi dan jadwal pelaksanaan pelatihan BCKS agar pelatihan dapat dilaksanakan tepat waktu;
6. Menyampaikan materi dengan pendekatan yang sesuai usia, budaya, dan nilai lokal, serta menggunakan bahasa yang santun dan edukatif dan menciptakan ruang diskusi yang aman dan inklusif agar peserta merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi;
7. Melakukan rapat internal untuk mengatur jadwal dan pemetaan sumber daya manusia. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk bersama-sama mengelola pelaksanaan kegiatan dengan kecukupan SDM dan ketepatan waktu.

[SK 2] Meningkatkan tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal sangat baik

Progress/Kegiatan

Pada triwulan 4, kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dokumen pertanggung jawaban belanja;
2. Pengelolaan Uang Persediaan minimal 1 kali per bulan;
3. Pengelolaan Uang Tambahan Persediaan (TUP) dan mempertanggungjawabkan secara tepat waktu;
4. Penyelesaian Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara secara tepat waktu setiap bulan/ tidak melebihi tanggal 10 setiap bulannya;
5. Menyampaikan laporan capaian output secara tepat waktu dan sesuai dengan proyeksi yang sudah dilakukan;
6. Koordinasi dengan Kanwil DJPb Wilayah Prov. Jawa Barat dan KPPN Bandung I terkait langkah-langkah akhir tahun anggaran 2025;
7. Koordinasi dengan BGTK DKI Jakarta terkait satuan pendidikan yang belum menyetorkan PNBPFungsional Kegiatan Program Pembelajaran Mendalam (PM) di Provinsi DKI Jakarta;
8. Rapat internal Bagian Keuangan terkait pembahasan strategi penarikan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kendala/Permasalahan

1. Pengumpulan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak tepat waktu menunda proses pencairan, baik melalui mekanisme Uang Persediaan maupun melalui L/S Bendahara;
2. Adanya keterlambatan pelaporan kontrak pengadaan dari Bagian Pengadaan ke Bagian Keuangan mempengaruhi proses pencairan keuangan;
3. Data pendukung kontrak yang tidak lengkap dari bagian pengadaan mempengaruhi proses pencairan keuangan;
4. Kesulitan penagihan biaya pelatihan PM dan KKA dari satuan pendidikan (biaya pelatihan bersumber dari dana Boskin/Bos SP/ Bosreg yang dikelola satpen) mempengaruhi proses pencairan dana PNBPFungsional;
5. Keterbatasan dalam melakukan realisasi belanja, dikarenakan adanya keterbatasan maksimum pencairan (MP) yang diambil;
6. Adanya deviasi hal III DIPA, capaian SBK, capaian output belum maksimal mengakibatkan nilai kinerja anggaran belum maksimal.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Strategi/Tindak Lanjut

1. Koordinasi dengan pegawai yang bertugas untuk memprioritaskan pengumpulan dokumen, pihak keuangan menetapkan deadline yang jelas dan tegas untuk pengumpulan dokumen;
2. Koordinasi rutin antara bagian pengadaan dan bagian keuangan untuk memantau proses pelaporan;
3. Membuat ceklist kelengkapan dokumen kontrak;
4. Membuat surat penagihan/kewajiban pembayaran biaya pelatihan PM dan KKA;
5. Melakukan perencanaan yang lebih baik untuk memprediksi kebutuhan dana dan mengajukan MP yang sesuai dan mengajukan revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan MP yang tersedia;
6. Melakukan revisi penyesuaian/pemutakhiran Rencana Penarikan Dana, segera melakukan SPJ capaian SBK dan pengisian capaian output.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat minimal A

Progress/Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen :
 - Program 2025 (DIPA/RKA-KL revisi);
 - Rencana Aksi, Capaian simproka;
 - Pengukuran Kinerja TW 3;
 - Laporan Keuangan TW 3;
 - Perjanjian Kinerja Revisi;
 - Rencana Strategis;
 - Manajemen Risiko;
 - Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Mandiri;
2. Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP dan melengkapi data dukung;
3. Mengikuti masa sanggah Evaluasi AKIP;

Kendala/Permasalahan

1. Data dukung SAKIP belum tertata dan terorganisir dengan baik;
2. Pengumpulan dan pengolahan data pengukuran kinerja belum optimal;
3. Kurangnya koordinasi, komunikasi dan pemahaman tim kerja dalam pemenuhan dokumen lembaga;
4. Keterlambatan penyusunan laporan kegiatan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melengkapi dokumen dan melakukan penataan serta update data dukung SAKIP;
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan tim data;
3. Melakukan koordinasi, komunikasi dan rapat dengan tim kerja;
4. Melakukan konfirmasi dan memastikan pada tim kerja agar segera menyelesaikan laporan kegiatan.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7614.DCI.003] Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	560	1950	Rp33.446.011.000	Rp33.445.567.285	100.00
2	[DI.7614.QDC.011] Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	Orang	2786	1485	Rp14.313.621.000	Rp14.313.541.334	100.00
3	[DI.7614.SCI.010] Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	674	890	Rp33.315.629.000	Rp7.082.456.116	21.26
4	[DI.7614.SCI.011] Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	1112	1112	Rp7.338.761.000	Rp7.338.638.204	100.00
5	[WA.7619.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	3	Rp20.000.000	Rp20.000.000	100.00
6	[WA.7619.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	3	Rp97.696.000	Rp97.694.810	100.00
7	[WA.7619.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	Rp41.622.651.000	Rp40.025.124.991	96.16
8	[WA.7619.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	0	1	Rp880.447.000	Rp880.346.991	99.99
Total Anggaran					Rp131.034.816.000	Rp103.203.369.731	78.76

D. Rekomendasi Pimpinan

Secara umum, target kinerja BBGTK Provinsi Jawa Barat tahun 2025 telah tercapai 100% sesuai Perjanjian Kinerja. Anggaran terealisasi sebesar **98,47%** (tanpa blokir). Sisa anggaran merupakan kelebihan penganggaran belanja gaji. Nilai Kinerja Anggaran dan nilai SAKIP sangat baik dan telah melampaui target.

Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan di tahun depan adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pusat atau pihak terkait lainnya untuk memastikan program prioritas dapat terlaksana dengan baik;
2. Menyusun strategi yang tepat pada pelaksanaan program kegiatan (regulasi, linimasa/jadwal, rencana penarikan dana);
3. Penguatan komitmen dan budaya kinerja agar setiap pegawai/tim kerja memahami pentingnya



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- pemenuhan dokumen lembaga dan Nilai Kinerja Organisasi;
4. Meningkatkan dan menjaga konsistensi capaian NKA (Nilai Kinerja Anggaran) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
 5. Meningkatkan layanan dan pemantauan pelaksanaan ZI - WBK.

Bandung, 20 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar GTK Provinsi Jawa
Barat

Dr. Sugito Adiwarsito, S.Pd., M.Pd.Or.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE